

FORMULASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN NO 7 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

**Oleh
Khairul Rijal
NIM. 170565201052**

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji Formulasi Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah. Problematika penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah daerah pesisir Kabupaten Karimun masih belum optimal dari aspek sarana dan prasarana sehingga mekanisme isi dari peraturan pengelolaan sampah masih belum menyesuaikan dengan kebutuhan pesisir Kabupaten Karimun, dengan didasari 4 indikator perumusan. formulasi kebijakan menggunakan teori dari Islamy dalam Nuryanti Mustari terdiri dari 4 indikator yakni Perumusan Masalah Kebijakan. Terlihat aspek perumusan dan perancangan tidak menyesuaikan dengan daerah pesisir, Penyusunan Agenda Pemerintah. Dari penyesuaian agenda yang tidak adaptif untuk daerah pesisir, Perumusan Usulan Kebijakan. Yang melahirkan usulan agenda dan formulasi tidak menyesuaikan dengan geografis yang dilihat dari perumusan dan penyusunan agenda dalam memformulasi peraturan daerah, Pengesahan Kebijakan. Pengesahan yang berjalan secara teknis dan prosedural. Penelitian ini melalui metode Deskriptif dengan pendekatan Kualitatif. Hasil penelitian ini berdasarkan indikator tahap-tahap Formulasi Kebijakan belum optimal sebagai mana mestinya dengan formulasi yang tidak menyesuaikan dengan daerah pesisir, peran pemerintah sebagai fasilitator untuk menjawab segala permasalahan publik khususnya masyarakat Kabupaten Karimun dalam pengelolaan sampah masih belum optimal dan adaptif secara geografis, ekonomi, sosial dan politik. Kesimpulan dari penelitian ini adalah peneliti melihat bahwa peran pemerintah daerah Kabupaten Karimun Perumusan yang harus diperbaharui sesuai dengan sebagai mana mestinya luas wilayah daerah kepulauan dengan menyerap kebutuhan-kebutuhan yang sesuai dengan letak geografis agar fomulasi kebijakan publik atau peraturan daerah bisa dirasakan dan berdampak untuk daerah-daerah terluar dari pulau Karimun dan Kundur yang mana sarana prasarana dan mekanisme penanganan bersifat urban untuk daerah perkotaan sehingga belum berdampak untuk daerah-daerah pesisir lainnya di Kabupaten Karimun.

Kata Kunci: Formulasi, Perda, Pengelolaan Sampah dan Pesisir/Kepulauan

**FORMULATION OF REGIONAL REGULATION OF KARIMUN REGENCY
NO. 7 OF 2013 CONCERNING WASTE MANAGEMENT**

By
Khairul Rijal
NIM. 170565201052
ABSTRACT

This research examines the Formulation of Karimun Regency Regional Regulation Number 7 of 2013 concerning Waste Management. The problem of this study shows that the waste management of the coastal areas of Karimun Regency is still not optimal in terms of facilities and infrastructure so that the content mechanism of the waste management regulations is still not adjusted to the coastal needs of Karimun Regency, based on 4 indicators of formulation. policy formulation using the theory of Islamy in Nuryanti Mustari consists of 4 indicators, namely Policy Problem Formulation. It can be seen that the aspects of formulation and design do not adjust to coastal areas, Formulation of the Government Agenda. From the adjustment of an agenda that is not adaptive to coastal areas, Formulation of Policy Proposals. What gives birth to the proposed agenda and formulation does not adjust to the geography seen from the formulation and preparation of the agenda in formulating regional regulations, Policy Endorsement. Ratification that runs technically and procedurally. This research is through descriptive method with qualitative approach. The results of this study based on indicators of the stages of Policy Formulation are not optimal as they should be with formulations that do not adjust to coastal areas, the role of the government as a facilitator to answer all public problems especially the people of Karimun Regency in waste management is still not optimal and adaptive geographically, economically, socially and politically. The conclusion of this study is that researchers see that the role of the regional government of Karimun Regency is the formulation that must be renewed in accordance with the size of the archipelago by absorbing the needs that are in accordance with the geographical location so that public policy formulations or regional regulations can be felt and have an impact on the outermost areas of the islands of Karimun and Kundur where infrastructure and handling mechanisms are urban for urban areas so that they have not had an impact on other coastal areas in Karimun Regency.

Keywords: Formulation, Regional Regulation, Waste Management and Coastal / Island